

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor penting dari pembangunan ekonomi karena kepariwisataan sangat erat kaitannya dengan semua sektor ekonomi, sehingga banyak memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Kota Wisata Batu, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya. Dampak positif yang mampu diberikan sektor pariwisata dalam upaya memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, meningkatkan kesempatan berusaha dan beragam lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat serta sebagai wahana bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sekaligus pengenalan budaya bangsa.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, peran sektor pariwisata dituntut mampu bersaing dan berkesinambungan di taraf Internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah khususnya Kota Wisata Batu harus mampu melaksanakan berbagai kebijakan guna memperkokoh struktur perekonomian khususnya di bidang kepariwisataan.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan diperlukan intensitas promosi dan komunikasi dengan pangsa pasar yang teridentifikasi dan disertai dengan peningkatan kualitas produk-produk kepariwisataan melalui perbaikan serta pembenahan amenities dan aksesibilitas pariwisata seperti peningkatan pelayanan imigrasi, fasilitas transportasi,

akomodasi, makan-minum, biro perjalanan, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung upaya peningkatan pariwisata.

Upaya tersebut harus diawali dengan proses perencanaan berdasarkan informasi atau data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga perencanaan tersebut berlangsung secara bertahap dan mencapai sasaran secara optimal. Perkembangan Kunjungan Wisata tersedia dalam tulisan ini dapat dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi baik oleh instansi pemerintah, maupun para pengusaha serta pelaku pariwisata untuk menentukan kebijakan di dalam usaha mereka.

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan di Kota Wisata Batu sampai tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang positif. Kondisi ini di karenakan makin meningkatnya kesadaran dan kepedulian dari kalangan pelaku pariwisata (stake holders) khususnya Pemerintah Kota Batu, dunia usaha serta masyarakat pemerhati pariwisata seperti pers, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya.

Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan. Selain sebagai penghasil devisa juga meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, membuka peluang dan kesempatan kerja serta memperkokoh persatuan dan kesatuan sekaligus pengenalan budaya. Efek ganda pariwisata mempunyai kaitan ekonomi kebelakang dengan sektor pendukung atau penunjang berkaitan dengan suplai barang dan jasa yang dibutuhkan usaha pariwisata. Sedang efek berikutnya adalah munculnya kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan wisatawan secara langsung oleh masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara pada tahun 2010 semakin memperbesar peluang usaha masyarakat untuk menunjang dunia kepariwisataan Kota Batu, sehingga peningkatan taraf ekonomi masyarakat meningkat.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sistem pemerintahan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi di daerah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan

pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta keseimbangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil redistribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan redistribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor redistribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Untunglah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah dewasa ini terus meningkatkan perkembangan kepariwisataan, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang tengah direncanakan maupun telah dilaksanakan seperti pembangunan dan penambahan daerah tujuan wisata. Semua itu dilakukan agar jumlah wisatawan yang datang semakin banyak dan semakin lama tinggalnya.

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan (multi sektoral) dan erat hubungannya dengan perkembangan ekonomi global. Disamping itu kepariwisataan merupakan kegiatan yang mengandalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam binaan yang ada pada masing-masing obyek dan daya tarik wisata dengan tetap berpedoman pada keseimbangan dan pelestarian (tanpa merusak potensi alam yang dimiliki) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa. Seperti yang telah diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GNHN) tahun 1999, bahwa mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, agronomis, sosial budaya, hemat energy, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Adapun pengembangan sektor pariwisata, sebagaimana tercantum dalam GBHN antara lain meliputi peningkatan pengembangan, dan pendayagunaan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha, mendorong pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan yang lain. Disamping perlunya pula peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata, penyediaan sarana-prasarana mutu dan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan nasional diharapkan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi sedangkan kenyataannya sektor pariwisata belum mendapatkan perhatian yang serius dan pemberdayaan yang optimal. Kota Batu mempunyai potensi dibidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang cukup besar diperkirakan perkembangannya akan cukup pesat dimasa yang akan mendatang. Dari berbagai obyek wisata yang ada di Kota Wisata Batu, obyek wisata alam yang paling menonjol adalah Cangar, Coban Rondo, Coban Talun. Sedangkan obyek wisata buatan seperti Agrowisata, Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS dan Selecta.

Obyek wisata Kota Batu sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kota Batu. Tetapi keberadaan obyek wisata Kota Batu akan kurang berdaya guna apabila pemerintah daerah

Kota Wisata Batu sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik, terutama faktor-faktor penunjang obyek wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi.

Berdasarkan uraian diatas penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian sebagai dasar untuk menyusun skripsi dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata Kota Batu dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam upaya pengembangan obyek wisata Kota Batu dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata Kota Batu dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menemukan mengenai faktor apa saja yang mendorong dan menghambat upaya pengembangan obyek wisata Kota Batu serta mencari tahu bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup Hukum Keuangan Daerah, sehingga menambah wawasan khususnya pada pengembangan sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Manfaat praktis

(1) Dinas Kepariwisataaan

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Dinas Kepariwisataaan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengembangkan obyek wisata Kota Batu dengan berbagai masalah yang dihadapinya.

(2) Bagi Pemerintah

Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah setempat terutama Dinas Kepariwisataaan Kota Batu dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengembangkan obyek wisata Kota Batu dengan berbagai masalah yang dihadapinya serta untuk mengetahui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara beruntutan dalam bentuk bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai :1. Kajian Umum tentang Keuangan Daerah 2. Kajian umum tentang Pendapatan Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, perusahaan daerah, lain-lain hasil usaha daerah yang sah. 3. Kajian Umum tentang Obyek Wisata terdiri dari pengertian obyek wisata dan jenis obyek wisata. 4. Kajian Umum tentang faktor-faktor pendorong pengembangan obyek wisata. 5. Kajian umum tentang penghambat obyek wisata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan masalah; waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data; teknik analisis data dan Definisi Operasional Konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan obyek wisata Kota Batu, mengetahui peran pemerintah daerah Kota Wisata Batu dalam mengembangkan obyek wisata dan mengetahui bagaimana obyek wisata Kota Batu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Kepariwisata Kota Batu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Wisata Batu. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai organisasi pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan daerah.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 poin ke-6).²

Otonomi Daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut daerah otonom. Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

¹ Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Jakarta, Grafindo, 2001, hlm 7

² Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 Pasal 1, "Tentang Otonomi Daerah".

pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.³

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.⁴

³ Prof. Drs. HAW. Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 7.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah.

B. Kajian Umum Tentang Keuangan Daerah

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu penjelasan Umum Nomor 6 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.⁵

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa “kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangannya memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan”. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

⁵ Widjaja, *Op-Cit*, hlm 110

Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi diluar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.⁶

C. Kajian Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada dasarnya sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD).
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan,
3. Lain-lain Penerimaan yang sah.⁷

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

⁶ W. Riawan Tjandra, "Hukum Keuangan Daerah", Jakarta, Grasindo, 2006, hlm 1

⁷ Prof. Drs. HAW. Widjaja, Op-Cit, hlm 110.

1. Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 1) Hasil Pajak daerah
 - 2) Hasil restribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain hasil penghasilan daerah yang sah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah PAD saja karena yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Hasil Pajak daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah disamping restribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.⁸

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

- 1). Pajak hotel
- 2). Pajak restoran
- 3) Pajak reklame
- 4). Pajak hiburan
- 5). Pajak penerangan jalan
- 6). Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7). Pajak parkir.

Dari jenis pajak, kabupaten atau kota tidak dapat memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai. Penetapan pajak daerah sedapat mungkin memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Hasil pemungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah dengan ongkos pungut yang serendah mungkin. Hasil tersebut dapat diperkirakan dan bersifat elastis, sedapat mungkin bertambah secara otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan sebagainya.

⁸ Situmorang, "Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 202

- 2) Keadilan, baik keadilan horizontal, vertical maupun geografis yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau redistribusi. Dasar pengenaan pajak atau redistribusi dan subyek yang membayar harus jelas.
- 3) Efisiensi, pajak dan redistribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen. Misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor non migas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komoditi ekspor antar daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.
- 4) Kemampuan administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administratif yang ada. Kemampuan tersebut dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran dan perangkat administrasi yang memadai.
- 5) Politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis. Pengenaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat.
- 6) Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.⁹

⁹ Tjahya Supriatna, "*Pajak Daerah*", Jakarta, Grafindo Persada, 1993, hlm 177

b. Hasil Restribusi Daerah

disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui restribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Restribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan :

- 1) Restribusi Jasa Umum adalah restribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- 2) Restribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Restribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari ketiga penggolongan redistribusi tersebut diatas, obyek wisata kota batu termasuk dalam pungutan redistribusi jasa yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

c. Perusahaan daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya yang disebut perusahaan daerah, bahwa sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.¹⁰

prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari hasil keuntungan itulah sebagian disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam yaitu:

- 1) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasionalisasi perusahaan asing.
- 2) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintahan daerah.
- 3) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintahan daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

¹⁰ Tjahya Supriatna, *Ibid*, hlm 195

Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan adalah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.

d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah selain pajak, restribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan sutau barang atau jasa dan dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda dari masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini masih lebih baik dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap

daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

Dalam rangka mengusahakan pemasukan uang kas kecuali dari sumber pajak daerah, redistribusi daerah, dan perusahaan daerah, daerah masih diperbolehkan untuk mengusahakan sendiri dalam memenuhi kepentingannya.

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah.¹¹

Dinas-dinas daerah telah ditempatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tapi bukan berti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya. Karena dalam kenyataannya, sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa daerah-daerah belum atau tidak memiliki kesanggupan yang memadai dalam hal keuangan, karena sumber-sumber keuangan atau pendapatan aslinya belum cukup dapat memberikan konstribusinya bagi pendapatan daerah. Kemudian oleh karena penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tetap diselenggarakan, maka pembiayaan untuk keseluruhan kegiatan, termasuk biaya rutinnya, ditanggung oleh pemerintah pusat melalui berbagai bentuk bantuan atau subsidi dan sumbangan..

¹¹ Situmorang, *Op-Cit*, hlm 211

Hal inilah yang menyebabkan munculnya ketergantungan daerah-daerah pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan otonomi daerah tidak sepenuhnya dapat berjalan dan dipihak lain mengundang kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal inilah yang merupakan salah satu titik pusat (fokus) kritik dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia.

Adanya campur tangan antara pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi daerah merupakan hal yang wajar, karena merupakan realisasi dari tanggung jawab pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan sekaligus sebagai konsekuensi bagi daerah dalam organisasi yang bersistem terbuka.

Perlu ditegaskan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat yang berlebih-lebihan dan campur tangan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah haruslah tetap berada dalam batas toleransi yang dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus terdapat keseimbangan dalam suatu penyelenggaraan otonomi yang benar-benar sehat, yakni otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat terwujud.

D. Kajian Umum Tentang Obyek Wisata

1. Pengertian Obyek wisata

Obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek yang daya tariknya berdasarkan kepada keindahan sumber daya alam, dan lingkungan.¹²

2. Jenis obyek wisata

Penggolongan obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Penggolongan obyek wisata berdasarkan pusat penelitian dibeberapa daerah yaitu:

- a. Obyek wisata budaya
- b. Obyek wisata alam
- c. Obyek wisata buatan

Sedangkan dalam UU No. 9 tahun 1990 disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

¹² Joyosuharto, Sunardi, "Aspek ketersediaan dan tuntutan kebutuhan dalam Pariwisata", Yogyakarta, Liberty, 2001, hlm 166

Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu wisata buatan manusia dan wisata alam. Dalam hal ini obyek wisata Kota Wisata Batu merupakan wisata alam dan buatan.

3. Faktor-faktor pendorong pengembangan obyek wisata

Modal kepariwisataan sering disebut sumber kepariwisataan. Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan disuatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.

Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri.

a. Modal dan potensi alam

Yang dimaksud alam disini adalah alam fisik, fauna dan floranya. Meskipun sebagai atraksi wisata ketiga-tiganya selalu berperan bersama, bahkan biasanya juga bersama-sama dengan modal kebudayaan dan manusia, akan tetapi ada salah satu yang menonjol peranannya.

Alam menarik bagi wisatawan karena:

- 1.) Banyak wisatawan tertarik karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dialam terbuka.

- 2.) Dalam kegiatan pariwisata jangka pendek, pada akhir pekan atau dalam masa liburan orang sering mengadakan perjalanan sekedar untuk menikmati pemandangan atau suasana pedesaan atau kehidupan diluar kota.
- 3.) Banyak juga wisatawan yang mencari ketenangan ditengan alam yang iklimnya nyaman, suasananya tenang pemandangannya bagus serta terbuka dan luas.
- 4.) Ada juga wisatawan yang menyukai tempat-tempat tertentu dan setiap kali ada kesempatan untuk pergi , mereka kembali ketempat-tempat tersebut.

b. Modal dari potensi kebudayaan.

Yang dimaksud kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau perikehidupan keratin dan sebagainya, akan tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengan-tengah suatu masyarakat.

Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata tamasya agar mereka dapat menikmati kebudayaan ditempat lain. Wisatawan tamasya hanya tinggal disuatu tempat selama masih ada pemandangan lain, jadi harus banyak cukup atraksi untuk menahannya cukup lama disuatu tempat. Akan tetapi juga diharapkan aka nada wisatawan rekreasi, yang menghabiskan waktu senggangnya ditengah-tengah masyarakat dengan kebudayaanya yang dianggap menarik.

c. Modal dan potensi manusia

Bahwa manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik kedatangan wisatawan bukan hal yang luar biasa, meskipun gagasannya mungkin akan membuat orang tersentak. Sudah tentu manusia sebagai atraksi wisata tidak boleh kedudukannya begitu direndahkan sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia.¹³

4. Faktor-faktor penghambat pengembangan obyek wisata.

a. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap lingkungan

Pengunjung obyek agrowisata berasal dari berbagai usia dan kalangan yang mempunyai tingkah laku yang berbeda. Sebagian pengunjung memang telah mempunyai kesadaran untuk menjadi pengunjung yang baik. Namun, tidak dapat dipungkiri ada juga pengunjung yang kesadarannya akan lingkungan kurang. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pengunjung sebagai bea masuk kadang dijadikan dasar bahwa pengunjung berhak melakukan apa saja yang disukainya. Kondisi ini menjadi problem tersendiri bagi pengelola agrowisata yang perlu diantisipasi.

E. Kajian Umum Tentang Pariwisata

1. Menurut letak geografis

- a) Pariwisata Lokal, merupakan kepariwisataan yang berkembang dalam lingkup yang kecil atau lokal dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
- b) Pariwisata Regional, kepariwisataan yang berkembang dalam lingkup regional. Kepariwisataan ini sudah mulai berkembang dan dinikmati

¹³ Joyosuharto, *Ibid*, hlm 187

bukan hanya daerah itu sendiri akan tetapi untuk daerah lain yang atau regional.

- c) Pariwisata Nasional, dalam arti sempit kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara, dimana wisatawan yang melakukan perjalanan adalah warga sendiri. Dalam arti luas kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara dimana wisatawan yang melakukan perjalanan adalah wisatawan luar negeri ataupun dari dalam negeri.
- d) Pariwisata yang berkembang di wilayah internasional namun masih terbatas di beberapa negara.
- e) Pariwisata Internasional yaitu kepariwisataan yang berkembang diseluruh dunia.

2. Menurut alasan dan tujuan perjalanan

- a) Pariwisata Bisnis, suatu perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan bisnis atau pariwisata berupa kegiatan kantor yang kemudian disisipi kegiatan kepariwisataan.
- b) Pariwisata Liburan, merupakan jenis kepariwisataan yang paling banyak dan sering dilakukan. Pariwisata ini bertujuan untuk beristirahat dan pada umumnya dilakukan pada waktu libur.
- c) Pariwisata Pendidikan, suatu pariwisata yang bertujuan untuk menambah ilmu dengan melihat obyek yang ada, biasanya bisa dibuat seperti study tour.

3. Pembagian menurut objeknya

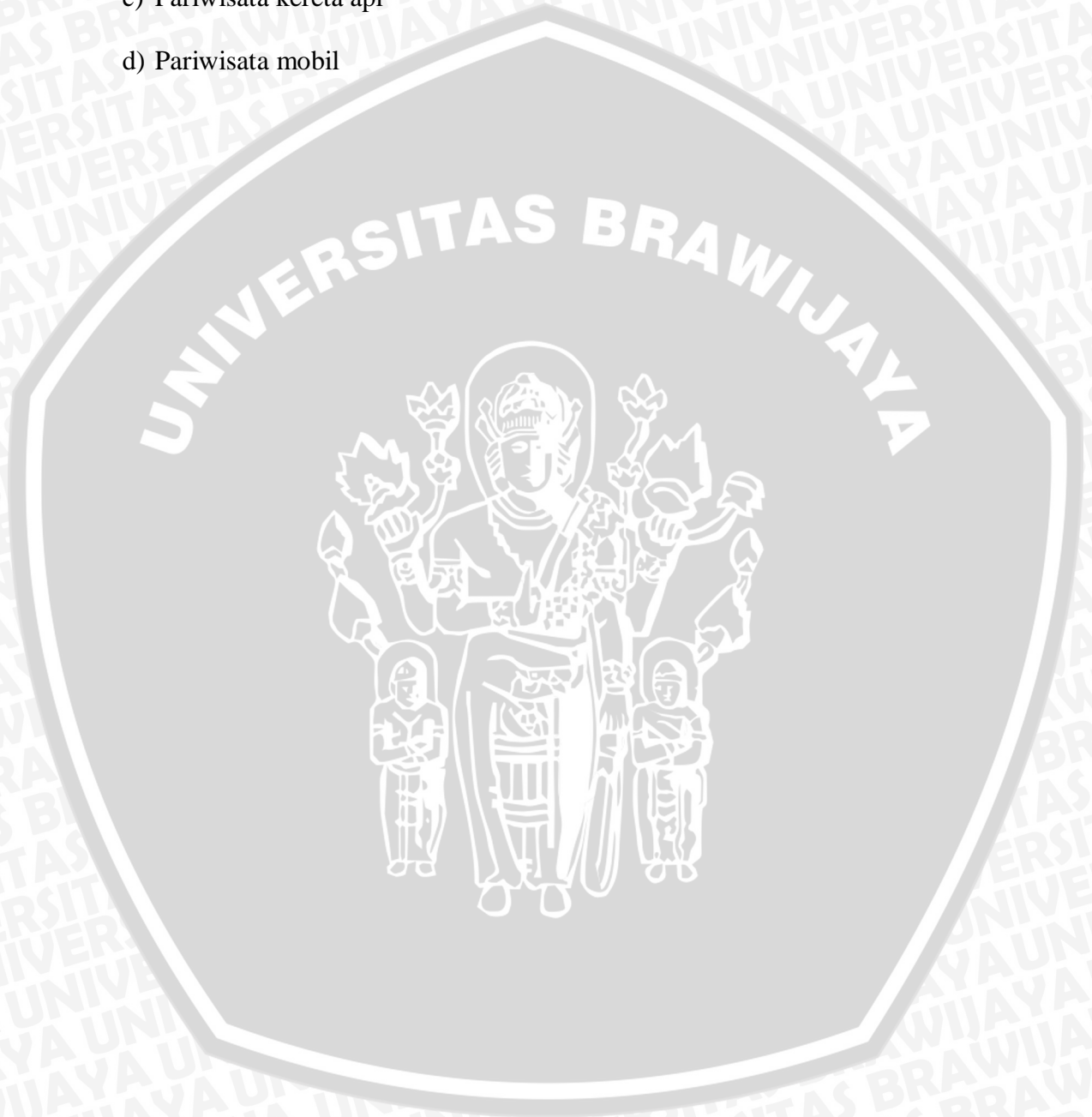
- a) Pariwisata yang dilakukan karena adanya daya tarik dari seni budaya dan potensi keindahan alam suatu tempat atau daerah.
- b) Pariwisata kesehatan, pariwisata yang dilakukan karena adanya daya tarik kesehatan seperti air tejun, sumber air panas yang airnya dapat menyembuhkan penyakit, dan sebagainya.
- c) Pariwisata perdagangan, pariwisata yang menjadi daya tariknya adalah perdagangan yang terdapat disuatu daerah. Contoh: kota yang terkenal dengan tekstilnya, pabrik gula, dapat dijadikan kota wisata.
- d) Pariwisata sejarah, pariwisata yang menjadi daya tariknya adalah peninggalan sejarah yang terdapat di daerah tersebut. Seperti : Bangunan peninggalan jaman Kolonial Belanda, peninggalan purbakala, candi, dll
- e) Pariwisata religius, pariwisata yang menjadi daya tariknya adalah adanya tempat ibadah, makam tokoh agama, pondok pesantren dan lain sebagainya. Contoh: Makam Wali Songo, Pondok Pesantren Suryalaya, Masjid Istiqlal.

4. Menurut jumlah wisatawan

- a) Pariwisata tunggal, apabila wisatawan yang berpergian hanya seorang atau sekeluarga.
- b) Pariwisata rombongan, apabila bepergian satu kelompok atau rombongan yang berjumlah 15 sampai 20 orang lebih.

5. Menurut alat angkut yang dipergunakan

- a) Pariwisata udara
- b) Pariwisata laut
- c) Pariwisata kereta api
- d) Pariwisata mobil



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan penelitian secara Yuridis Empiris diwujudkan untuk mengkaji, persoalan-persoalan hukum nyata yang terjadi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan anggaran obyek wisata Kota Batu apakah sudah berjalan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kepariwisata Kota Wisata Batu. Kota Pariwisata Kota Batu ini terpilih karena kota Batu merupakan kota yang penuh dengan obyek wisata yang banyak dikunjungi dari beberapa daerah.

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah kepala Dinas Kepariwisata Kota batu serta anggota-anggota yang lain yang berkaitan dengan obyek wisata kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah sesuai dengan Undang-Undang. No. 32 tahun 2004. Dinas Kepariwisata Kota batu yang menjadi subyek spesifik penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.¹⁴ Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Dinas Kepariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Dengan wawancara kepada kepala Dinas Pariwisata dan staf Dinas Pendapatan Daerah terhadap peningkatan anggaran pendapatan asli daerah dalam pengembangan obyek wisata Kota Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:¹⁵ Literatur, penelusuran Internet, atau studi Dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-Undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata dalam rangka meningkatkan anggaran di Kota Batu.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *“Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek”*, Jakarta, Rineka Cipta 1997, hlm 34

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Ibid*, hlm 34.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan anggota Dinas Pariwisata yang lain di Kota Batu yang menangani mengenai upaya pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata dalam rangka meningkatkan anggaran di Kota Batu.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, situs-situs Internet, Literatur pustaka Instansi Dinas Pariswisata Kota batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada Instansi Dinas Pariwisata Kota Batu. Wawancara dikaji dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawacara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

b. Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data-data, peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan Perundang-Undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Instansi Dinas Pariwisata Kota Batu berkaitan dengan upaya pemerintah kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata dalam rangka meningkatkan anggaran Pendapatan asli Daerah, dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Populasi, Sample dan Responden Penelitian

1. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁶ Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Dinas kepariwisataan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.
2. Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷ pada skripsi ini sample penelitian yaitu Kepala Dinas Kepariwisataan dan sekretaris Dinas Kepariwisataan serta staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

¹⁶ Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, Hlm 44

¹⁷ Roni Hanitojo, *Ibid*, hlm 44

3. Responden Penelitian ini adalah :

Responden penelitian atau tokoh yang diwawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan upaya pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata dalam rangka meningkatkan anggaran. Yaitu pegawai Dinas Kepariwisataaan serta Kepala Dinas Kepariwisataaan, serta staf Dinas Pendapatan Daerah, jadi responden penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang.

G. Metode Analisa Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif berupa kenyataan dari permasalahan mengenai upaya pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan obyek wisata dalam rangka meningkatkan anggaran Pendapatan asli Daerah di Kota Batu serta Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam upaya pengembangan obyek wisata Kota Batu dan bagaimana solusinya yang akan diteliti dengan cara memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan meningkatkan anggaran Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Upaya Pemerintah adalah, kondisi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan suata sarana ataupun prasarana untuk menacapai hasil yang diinginkan dengan cara-cara tertentu yang akan ditempuh sehingga menghasilkan hasil yang dapat diperoleh secara maksimal.

2. Pengembangan adalah, proses, cara, perbuatan menjadikan maju atau secara pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kesasaran yang dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan obyek wisata Kota Batu agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
3. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang merupakan perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Obyek wisata yang perlu dikembangkan disini adalah obyek wisata Kota Batu.
4. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan menaikkan (usaha, kegiatan dan sebagainya)
5. PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut UU No. 25 Tahun 1999 diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Wisata Batu

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Batu terletak pada posisi $122^{\circ}17'$ - $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ - $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42 % dari total luas Jawa Timur. Bentang wilayahnya berupa bukit, gunung, jurang terjal dan daerah dataran dengan batas wilayah sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- > Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- > Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang
- > Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah seluas 19.908,72 Ha tersebut, terbagi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha, dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 Ha.

2. Kondisi Geologis

Kota Batu mempunyai 4 (empat) jenis tanah antara lain: (1) Andosol, berupa lahan yang paling subur, meliputi Kecamatan Batu (1.831,04 Ha), Kecamatan Junrejo (1.526,19 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (2.873,89 Ha). (2) Kambisol, berupa tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu

(889,31Ha), Kecamatan Junrejo (741,25 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (1.395,81 Ha) (3) Alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu (239,86 Ha), Kecamatan Junrejo (199,93 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (376,48 Ha). (4) Latosol meliputi Kecamatan Batu seluas (260,34 Ha), Kecamatan Junrejo seluas (217,00 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (408,61 Ha).

Pariwisata merupakan sektor penting dari pembangunan ekonomi karena kepariwisataan sangat erat kaitannya dengan semua sektor ekonomi, sehingga banyak memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Kota Wisata Batu, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya. Dampak positif yang mampu diberikan sektor pariwisata dalam upaya memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, meningkatkan kesempatan berusaha dan beragam lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat serta sebagai wahana bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sekaligus pengenalan budaya bangsa.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, peran sektor pariwisata dituntut mampu bersaing dan berkesinambungan di taraf Internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah khususnya Kota Wisata Batu harus mampu melaksanakan berbagai kebijakan guna memperkokoh struktur perekonomian khususnya di bidang kepariwisataan.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan diperlukan intensitas promosi dan komunikasi dengan pangsa pasar yang teridentifikasi dan disertai dengan peningkatan kualitas produk-produk kepariwisataan melalui perbaikan serta pembenahan amenities dan aksesibilitas pariwisata seperti peningkatan pelayanan imigrasi, fasilitas transportasi, akomodasi, makan- minum, biro perjalanan, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung upaya peningkatan pariwisata.

Upaya tersebut harus diawali dengan proses perencanaan berdasarkan informasi atau data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga perencanaan tersebut berlangsung secara bertahap dan mencapai sasaran secara optimal. Perkembangan Kunjungan Wisata tersedia dalam tulisan ini dapat dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi baik oleh instansi pemerintah, maupun para pengusaha serta pelaku pariwisata untuk menentukan kebijakan di dalam usaha mereka.

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan di Kota Wisata Batu sampai tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang positif. Kondisi ini di karenakan makin meningkatnya kesadaran dan kepedulian dari kalangan pelaku pariwisata (stake holders) khususnya Pemerintah Kota, dunia usaha serta masyarakat pemerhati pariwisata seperti pers, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Made Suardika Sub Bagian Program Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu, Pada Tanggal 1 juni 2011, Pukul 10.15 WIB.

3. Srtuktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Batu

Subtansi Utama Rencana Kerja (Renja), hakekatnya memuat program atau kegiatan dalam konteks Akuntabilitas kinerja sesuai bidang atau bagian secara rinci untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Renja Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu disusun sebatas Program dan Kegiatan Pembangunan dan Pembangunan Kepariwisataaan yang dibiayai APBD Kota Batu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja Pariwisata dan Kebudayaan juga merupakan salah satu dasar berpijak untuk menjalankan komitmen kesepakatan Program dan Kegiatan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang telah melalui pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Pembangunan kepariwisataan harus tetap menjunjung ciri khas kepribadian Bangsa Indonesia, oleh karena itu penyusunan Renja Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu harus bertumpu pada pemikiran ke Khas'an Budaya, Keindahan Alam serta hubungan antar Manusia yang didasarkan pada nilai-nilai Agama, Pelestarian Sumber Daya Alam dan Budaya, Kepentingan Politik, Ekonomi, Sosial dan Keamanan.¹⁹

a. Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dimaksudkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama 1 (satu) tahun.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Suardika Sub Bagian Program, Tanggal 1 Juni 2011, Pukul 11.15 WIB.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah terwujudnya kualitas SDM kepariwisataan yang profesional serta berwawasan kebangsaan yang diwujudkan melalui pelatihan dan penyuluhan

1. Terwujudnya DTW yang selaras dengan Sapta Pesona sehingga memberikan kepuasan pada wisatawan, baik Wisnus maupun Wisman yang datang berkunjung
2. Terwujudnya kelancaran dan kemudahan perjalanan wisata serta pelayanan di bidang pariwisata
3. Terciptanya pengembangan produk-produk pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan budaya yang dikemas dan diberdayakan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan sentuhan seni daerah
4. Tersedianya peluang kerja bagi para pengusaha kecil dan menengah sehingga terjalin hubungan kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan dilandasi rasa saling menghormati, menghargai, dan menguntungkan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Terwujudnya keamanan dan keselamatan para wisatawan, melalui pemberian jaminan perlindungan sehingga wisatawan memperoleh kenyamanan selama menikmati perjalanan wisata
6. Terciptanya seni budaya daerah sebagai ciri khas daerah yang merupakan salah satu aset pariwisata
7. Terwujudnya pemasaran yang intensif di berbagai daerah untuk meningkatkan kedatangan wisatawan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar DTW serta memperkenalkan seni budaya daerah
8. Tersedianya sarana wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan atau harapan wisatawan
9. Terwujudnya jaringan informasi antara wisatawan, pengusaha wisata obyek wisata dan jasa wisata

b. Tujuan Dinas Pariwisata Kota Batu

- a) Terwujudnya kualitas SDM kepariwisataan yang profesional serta berwawasan kebangsaan yang diwujudkan melalui pelatihan dan penyuluhan
- b) Terwujudnya DTW yang selaras dengan Sapta Pesona sehingga memberikan kepuasan pada wisatawan, baik Wisnus maupun Wisman yang datang berkunjung
- c) Terwujudnya kelancaran dan kemudahan perjalanan wisata serta pelayanan di bidang pariwisata
- d) Terciptanya pengembangan produk – produk pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan budaya yang dikemas dan diberdayakan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan sentuhan seni daerah
- e) Tersedianya peluang kerja bagi para pengusaha kecil dan menengah sehingga terjalin hubungan kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan dilandasi rasa saling menghormati, menghargai, dan menguntungkan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- f) Terwujudnya keamanan dan keselamatan para wisatawan, melalui pemberian jaminan perlindungan sehingga wisatawan memperoleh kenyamanan selama menikmati perjalanan wisata
- g) Terciptanya seni budaya daerah sebagai ciri khas daerah yang merupakan salah satu aset pariwisata

- h) Terwujudnya pemasaran yang intensif di berbagai daerah untuk meningkatkan kedatangan wisatawan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar DTW serta memperkenalkan seni budaya daerah
- i) Tersedianya sarana wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan atau harapan wisatawan
- j) Terwujudnya jaringan informasi antara wisatawan, pengusaha wisata obyek wisata dan jasa wisata

c. Landasan Normatif Dibentuknya Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Pariwisata dan Kebudayaan Kota batu disusun berdasarkan Landasan Idiil Pancasila, UUD 1945, serta Peraturan Perundang-undangan yang lain sebagai berikut :

1. UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu
2. UU No. 09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata;
3. UU No. 05 Tahun 1992 Tentang Budaya Cagar Alam;
4. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
5. PP No. 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya;
6. Kepres No. 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjung Singkat (BVKS)
7. Supres No. 07 Tahun 1999 Tentang LAKIP;
8. SE Depdagri dan Otda RI No. 050 / 1240 / II / Pengda tentang Pedoman penyusunan dokumen Percetakan, Pembangunan, Propinsi Kabupaten/Kota;
9. UU No 10 Tahun 2009 Perubahan UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata;

d. Visis Dan Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu

1. VISI

Sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan ditopang SDM, SDA, dan SDB yang didayagunakan secara optimal, terkendali dengan pemerintahan kreatif inovatif, bersih bagi seluruh rakyat.

2. MISI

- a) Mewujudkan SDM Pariwisata yang mempunyai kompetensi
- b) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ODTW
- c) Meningkatkan infra Struktur Pariwisata
- d) Mengembangkan Produk Pariwisata, baik sumber daya alam maupun seni budaya lokal untuk dikemas dan diperdagangkan.
- e) Melindungi para wisatawan yang datang agar memperoleh kenyamanan selama menikmati perjalanan wisata.
- f) Memberdayakan dan mendorong pertumbuhan usaha pariwisata serta menjalin hubungan kerja dengan pengusaha industri kecil ,menengah dan antar daerah.
- g) Menggali dan melestarikan sejarah, seni budaya, adat istiadat sebagai ciri khusus budaya lokal.
- h) Mempromosikan ODTW dan seni budaya daerah.
- i) Mengembangkan jasa dan sarana wiasata.
- j) Membangun pusat informasi wiasata.

e. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Batu.

Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang berjumlah 80 orang, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

B. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Obyek wisata Kota Batu termasuk obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kota Batu. Sehingga dalam pengembangan obyek wisata itu sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Batu yang dalam hal ini merupakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu. Upaya pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan penataan lingkungan kepariwisataan di Kota Batu diarahkan kepada hal-hal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas di setiap obyek wisata Kota Batu, Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek wisata Kota Batu, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengusaha jasa pariwisata Kota Batu, Meningkatkan minat investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata dan Meningkatkan koordinasi dengan Dinas atau Instansi dalam penyelenggaraan pembangunan di obyek wisata.²⁰

1. Sasaran kegiatan pengembangan kepariwisataan di Kota Wisata Batu sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana atau fasilitas di setiap obyek wisata.
- b. Terwujudnya peningkatan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek wisata.
- c. Terciptanya respon masyarakat dan pengusaha jasa pariwisata dalam menciptakan lingkungan yang indah dan menarik.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Suardika Sub Bagian Program DISPARBUD, Tanggal 4 Juni 2011, Pukul 10.00 WIB.

- d. Terciptanya minat investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata.
- e. Terciptanya peningkatan koordinasi dengan Dinas atau Instansi dalam penyelenggaraan pembangunan di obyek wisata.

Agar sasaran tersebut dapat tercapai maka program yang diambil adalah melengkapi sarana dan prasarana di setiap obyek wisata, sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha pariwisata untuk lebih mematuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya, Sosialisasi Badan atau Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kota Batu agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor kepariwisataan dan meningkatkan kerjasama dengan Biro perjalanan, Sekolah, kampus, perusahaan, Dinas, Instansi, lembaga, Badan pemerintah maupun swasta.²¹

Dalam pengembangan obyek wisata Kota Batu sendiri, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu mempunyai beberapa program kedepan, diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola kepariwisataan dengan melaksanakan pembinaan, penataran dan pelatihan bagi pengelola pariwisata.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan obyek wisata.
3. Pembangunan untuk pengembangan sarana dan penataan lingkungan di obyek wisata.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyitno bagian pengembangan produk pariwisata, Tanggal 4 Juni 2011, Pukul 10.15 WIB.

4. Sosialisasi pada Badan atau Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kota Batu agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor kepariwisataan.
5. Sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha pariwisata untuk lebih memahami segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya.
6. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar obyek wisata secara bertahap agar masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap obyek wisata Kota batu.
7. Menekan angka kebocoran di obyek wisata melalui pembinaan terhadap para aparat pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.
8. Melaksanakan promosi baik melalui mengikuti pameran, media massa, media elektronik maupun internet.
9. Meningkatkan, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah.
10. Meningkatkan penyelenggaraan *event* kepariwisataan dan budaya yang menarik bagi wisatawan.²²

Sedangkan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk mengembangkan obyek wisata Kota batu yang sudah terlaksana diantaranya adalah:

1. Pembangunan berbagai fasilitas wisata seperti pintu gerbang masuk obyek wisata, tempat penjualan karcis, tempat parkir, hotel, rumah makan dan cafe, panggung terbuka, gedung kesenian, pondok wisata, kamar mandi, mesjid dan mushola, kios cinderamata, pasar, kantor pos, rumah sakit, dan pasar tradisional.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Suyitno Bidang pengembangan produk pariwisata, Pada Tanggal 4 Juni 2011, Pukul 11.00 WIB.

2. Pementasan seni di kawasan obyek wisata Kota Batu untuk menarik minat wisatawan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan *event* kepariwisataan dan budaya yang menarik bagi wisatawan.
4. Sosialisasi kebijakan pusat dan daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata.
5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) di ikut sertakan dalam Diklat kepegawaian kepariwisataan, mengikuti seminar kepariwisataan, dan mengadakan studi banding.
6. Untuk promosi, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) telah melaksanakan promosi baik melalui media massa, media elektronik dan mengikuti seminar maupun internet.
7. Untuk mengatasi kurang tertibnya pedagang kaki lima, maka kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara pemindahan para pedagang kaki lima ke lokasi pasar wisata yang sengaja di bangun oleh Pemerintah Kota Batu.²³

Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maka obyek wisata Kota Batu sudah mengalami perkembangan baik dari segi fisik maupun dari segi jumlah pengunjung yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendapatan retribusinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

²³ Hasil Wawancara dengan Suyitno bidang pengembangan produk pariwisata, Pada Tanggal 4 Juni 2011, Pukul 11.00 WIB.

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Penerimaan daerah Kota Batu yang berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian dana perimbangan, bagian pinjaman daerah, dan bagian lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun kontribusi obyek wisata Kota Batu untuk Pendapatan Asli Daerah dalam mengembangkan obyek wisata diperlukan modal kepariwisataan yang mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Modal kepariwisataan terdiri atas faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan obyek wisata Kota Batu. Dengan mengetahui identifikasi faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan obyek wisata Kota Batu, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah pendapatan obyek wisata Kota Batu. Dengan meningkatnya jumlah pendapatan obyek wisata Kota Batu, maka secara tidak langsung akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Obyek wisata Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata terus dikembangkan guna dimanfaatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, obyek wisata tersebut terus dikembangkan karena bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja di sektor pariwisata serta untuk memperkenalkan dan mendayagunakan alam serta budaya daerah.

Dinas Pariwisata sebagai pengelola obyek wisata yang berusaha melayani masyarakat melalui masyarakat melalui sarana rekreasi telah memperoleh pendapatan atas penyelenggaraan jasa pariwisata yang telah diberikan. Dengan demikian, yang dimaksud pendapatan obyek wisata Kota Batu adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan karcis kepada para wisatawan yaitu berupa retribusi wisatawan dan parkir wisatawan.

Pendapatan retribusi obyek wisata Kota Batu yang paling tinggi pada tiap tahunnya dipengaruhi oleh adanya hari libur bagi para pelajar dan hari-hari besar lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pendapatan retribusi obyek wisata kota batu dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini;

Tabel 1 “Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terkait dengan Tempat Wisata”

Jenis Pendapatan Tempat Wisata	Target	Realisasi	Keterangan
Tahun 2007	1.267.800.000,00	1.460.943.146,00	+ 193.143.146,00
Tahun 2008	2.150.000.000,00	1.334.930.070,00	-815.069.930,00
Tahun 2009	2.458.000.000,00	1.927.116.490,00	-530.883.510,00
Tahun 2010	3.850.000.000,00	2.706.851.000,00	-1.143.149.000,00

Data Primer Tidak Diolah tahun 2011

Keterangan:

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan dari obyek wisata Kota Batu secara umum meningkat rata-rata 30 % setiap tahunnya atau rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.857.460.176,00 per tahunnya. Peningkatan yang menonjol terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 779.734.510,00, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 126.013.076,00.²⁴

Tabel 2” Tentang Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terkait dengan Restribusi Parkir”

Jenis Pendapatan Restribusi Parkir	Target	Realisasi	Keterangan
Tahun 2007	105.000.000,00	115.871.650,00	+10.871.650,00
Tahun 2008	150.000.000,00	70.924.000,00	-79.076.000,00
Tahun 2009	150.000.000,00	197.450.000,00	+47.450.000,00
Tahun 2010	300.000.000,00	213.040.000,00	-86.960.000,00

Data Primer Tidak Diolah Tahun 2011

²⁴ Hasil wawancara dengan Staf Dinas Pendapatan Daerah, Pada tanggal 11 Juni 2011, Pukul 10.50 WIB.

Keterangan:

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan redistribusi parkir dari obyek wisata Kota Batu secara umum meningkat rata-rata 25 % setiap tahunnya atau rata-rata pendapatan sebesar Rp 597.285.650,00 per tahunnya. Peningkatan yang menonjol terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 15.590.000,00, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 44.947.650,00.

Kenaikan dan penurunan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah wisatawan serta besarnya tarif masuk wisatawan dan parkir kendaraan di obyek wisata. Bila jumlah wisatawan meningkat, maka pendapatan juga cenderung meningkat. Demikian pula jika tarif masuk wisatawan dan parkir kendaraan di obyek wisata naik maka pendapatan juga meningkat.²⁵ Pendapatan redistribusi yang dihasilkan di obyek wisata Kota Batu disetorkan oleh pihak pengelola di lapangan ke Dinas Pariwisata. Selanjutnya pihak Dinas Pariwisata yang menyetorkan redistribusi tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu (DISPENDA).

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pengembangan obyek wisata Kota Batu berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, walaupun tidak terlalu besar. Retribusi tempat rekreasi meningkat sebesar 30% per tahunnya. Pendapatan retribusi dari obyek wisata Kota Batu sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Semakin besar jumlah pengunjung obyek wisata maka pendapatan retribusi dari obyek wisata tersebut juga akan ikut naik. Di lain pihak, besar kecilnya jumlah pengunjung

²⁵ Hasil wawancara dengan staf Dinas Pendapatan Daerah, pada Tanggal 11 Juni 2011, pukul 11.00 WIB.

sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap obyek wisata tersebut. Dalam hal ini, pihak pengelola harus mampu mengemas obyek wisata sedemikian rupa agar layak untuk dijual. Dari hasil penelitian di Dinas Pendapatan dapat dilihat bahwa pengembangan obyek wisata Kota Batu berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kota Batu. Kota Batu, walaupun tidak terlalu besar, namun kontribusi obyek wisata Kota Batu terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 30% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 1.857.460.176,00 pertahunnya. Retribusi parkir rata-rata meningkat sebesar 30% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 10.871.650,00 pertahunnya. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah pendapatan retribusi obyek wisata Kota batu yang rata-rata meningkat sebesar 30% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 1.857.460.176,00 pertahunnya Akan tetapi, pendapatan retribusi dari obyek wisata Kota batu sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Semakin besar jumlah pengunjung obyek wisata maka pendapatan retribusi dari obyek tersebut akan ikut naik.²⁶

2. Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata

Dari 12 Daerah Tujuan Wisata yang sudah pernah dikunjungi wisatawan, pada tahun 2009 hanya 2.081.899 wisatawan yang berkunjung ke Kota Wisata Batu. Tahun 2010 Daerah Tujuan Wisata yang dikunjungi semakin banyak dibanding tahun 2009, dengan total kunjungannya mengalami kenaikan sekitar 24.37 % dari tahun sebelumnya.

²⁶ Hasil wawancara dengan Staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, Pada Tanggal 9 Juni 2011, Pukul 10.45 WIB.

Tabel 3 “Kunjungan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2008 , 2009 dan 2010”

No	Nama DTW	Kunjungan tahun 2008	Kunjungan tahun 2009	Kunjungan tahun 2010	Pertumbuhan (%)
1	Taman Rekreasi Selecta	321.527	388.593	461.274	18.70 %
2	Kusuma Agrowisata	183.419	166.225	54.734	- 75.64 %
3	Jatim Park 1	753.796	788.466	629.974	- 25.03 %
4	Songgoriti	65.575	111.023	46.383	- 58.22 %
5	BNS	0	266.733	291.092	9.13 %
6	Air Panas Cangar	177.726	342.921	288.341	- 15.92 %
7	Wisata Petik Apel	6.695	11.588	11.594	22.47 %
8	Vihara Dhammadipa	6.695	11.588	11.594	0.05 %
9	Jatim Park 2	0	0	3.480	100.00 %
10	Rafting ” Kaliwatu ”	0	0	15.587	100.00 %
11	Ingu Laut Florist	0	0	10.686	100.00 %
12	Beji Outbond	0	0	7.993	100.00 %
13	Coban Talun	0	0	6.278	100.00 %
14	Coban Rais	0	0	6.133	100.00 %
15	Kampung wisata kungkuk	0	0	4.825	100.00 %
16	Jagung Bakar Payung	0	0	83.372	100.00 %
17	Kampoeng Kidz	0	0	5.939	100.00 %
18	Desa Wisata Bumiaji	0	0	6.036	100.00 %
19	Rafting Boenga Batoe	0	0	1.769	100.00 %
20	Rafting Banyu Brantas	0	0	1.044	100.00 %
21	Paralayang Gunung Banyak	0	0	860	100.00 %
Jumlah		1.502.043	2.081.899	2.197.685	5.56 %

Data Primer tidak diolah Tahun 2011

Keterangan:

Dilihat dari kriteria jumlah kunjungan, Jatim Park I merupakan Daerah Tujuan Wisata andalan Kota Batu, dimana tahun 2010 tercatat 629.974 kunjungan. Kemudian yang menerima kunjungan cukup banyak adalah Taman Rekreasi Selecta, Air Panas Cangar dan Batu Night Spectacular.

Dilain pihak besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap obyek tersebut. Dalam hal ini, pihak pengelola obyek wisata harus mampu mengemas obyek wisata sedemikian rupa agar layak untuk dijadikan tempat wisata yang banyak diminati oleh pengunjung obyek wisata.

Faktor pendorong dalam pengembangan obyek wisata Kota Batu yang terdiri dari wilayahnya yang straregis dengan banyak pilihan tujuan wisata yang dapat dinikmati oleh para pengunjung obyek wisata, memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan. Hal ini harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menuju obyek wisata, tempat parkir, kamar mandi, mushola, hotel dan rumah makan dan kios cinderamata. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, wisatawan akan enggan untuk datang karena merasa kurang nyaman.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Daud Malino Seksi peran masyarakat, Pada Tanggal 9 Juni 2011, Pukul 01,00 WIB.

C. Faktor-faktor Yang Mendorong dan Menghambat Pengembangan Obyek

Wisata Kota batu

1. Faktor yang mendorong pengembangan obyek wisata kota batu

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumen di obyek wisata Kota Batu, maka peneliti mengidentifikasi hasil penilaian terhadap potensi obyek wisata Kota Batu.

a. Daya Tarik

Daya tarik utama yang ada di obyek Wisata Kota Batu adalah :

- 1) Letaknya yang strategis dan bermacam-macam obyek wisata yang dapat dikunjungi.
- 2) Dapat menikmati obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan.

b. Sarana Perhubungan

Jalan yang menuju ke lokasi obyek wisata Kota Batu kondisinya sudah cukup baik karena sudah beraspal, Kendaraan umum yang melewati lokasi wisata jumlahnya cukup banyak karena ada trayek ke obyek wisata Kota Batu. Rata-rata wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kota Batu menggunakan Bus, kendaraan sendiri baik mobil maupun sepeda motor.

c. Pengelolaan, perawatan dan pelayanannya

Dalam pengelolaan, perawatan dan pelayanannya obyek wisata ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) yang secara operasional dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan yang baik dan keramah tamahan dari pihak pengelola

merupakan salah satu faktor yang penting dalam pariwisata, karena dengan adanya pelayanan yang baik tersebut maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman. Pelayanan di lokasi kepada wisatawan cukup baik karena ada petugas yang ditunjuk untuk memandu wisatawan yang memerlukan penjelasan atau bantuan.

d. Akomodasi

Akomodasi yang tersedia di obyek wisata Kota Batu berupa tempat untuk peristirahatan para wisatawan. Hotel di sekitar lokasi sudah ada sehingga bagi wisatawan yang ingin menginap dapat menginap di hotel yang ada di lokasi obyek wisata.²⁸

2. Tentang faktor-faktor yang menghambat pengembangan obyek wisata

Kota Batu berikut:

Adanya persaingan yang semakin ketat dengan daerah lain di luar Kota Batu misalnya;

- 1) Meningkatnya pengaruh luar yang mempengaruhi, sehingga menyebabkan melemahnya budaya daerah.
- 2) Kultur masyarakat yang kurang mendukung terhadap percepatan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- 3) Adanya penyusupan pengunjung melalui jalan masuk wilayah obyek wisata, hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran dari para pengunjung untuk membayar redistribusi.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sinal Abidin Bidang promosi dan Pemasaran, Pada Tanggal 9 Juni 2011, Pukul 13.00 WIB.

- 4) Masih kurang sadarnya lembaga-lembaga swasta terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan.²⁹

Fasilitas pelayanan yang merupakan kebutuhan wisatawan telah diupayakan obyek wisata Kota Batu dalam menarik arus wisatawan yang sebanyak-banyaknya, dari pengadaan fasilitas yang berupa pelayanan kesehatan, informasi obyek, dan fasilitas keamanan.

Berbagai upaya telah ditempuh pengelola obyek wisata Kota Batu dalam upaya lebih mengenalkan pada masyarakat adalah melalui media cetak dan elektronik lokal maupun nasional, hal ini memerlukan adanya media informasi yang bertugas di dalam obyek atau untuk memperkenalkan keluar. Promosi juga selalu dilakukan setiap ada kesempatan seperti pameran-pameran pembangunan secara periodik.

Pendanaan untuk membiayai seluruh kebutuhan dalam mengelola obyek wisata Kota Batu pada saat ini tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat saja, karena obyek wisata Kota Batu termasuk obyek wisata yang mutlak dikelola oleh pemerintah Daerah dan oleh para Investor serta ada campur tangan dari pihak ke tiga. Adanya keterlibatan dari investor mengakibatkan penerimaan pendapatan obyek wisata Kota batu semakin meningkat dan berkembang, sehingga pengembangan obyek wisata Kota Batu memenuhi yang diharapkan oleh pihak pengelola karena banyak anggaran dana untuk membangun sarana dan prasarana yang sudah direncanakan.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyitno bagian pengembangan produk pariwisata, Pada Tanggal 11 Juni 2011, Pukul 09.30 WIB.

Program perancangan pengembangan obyek wisata Kota Batu :

a. Jangka Panjang

- 1) Menjadikan lahan pengembangan untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas obyek wisata kota batu yaitu dengan membuat tempat obyek wisata penuh dengan pilihan untuk menikmati obyek wisata yang ingin dinikmati oleh para pengunjung.
- 2) Perluasan lahan parkir, Lahan parkir yang dimiliki obyek wisata Kota Batu pada saat ini sudah memadai dan dapat menampung semua kendaraan pengunjung. Sehingga untuk menambah fasilitas dan meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, pengelola bermaksud menambah luas areal parkir.

b. Jangka Pendek

Pihak pengelola pada saat ini untuk program jangka pendek lebih memfokuskan kepada studi pengembangan penataan ruang. Kota Batu ke obyek-obyek wisata lainnya. Tujuannya agar menambah masukan agar dapat menata ruang obyek wisata agar lebih menarik lagi.³⁰

Sehingga faktor pendorong pengembangan obyek wisata Kota Batu terdiri dari:

- a. potensi alam yaitu lingkungan alam yang dengan kondisi alami dan asri,
- b. potensi manusia meliputi kualitas tenaga kerja dalam mengelola obyek wisata Kota Batu sudah cukup baik.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suyitno bagian pengembangan produk pariwisata, Pada tanggal 11 Juni 2011. Pukul 10.30 WIB.

Terdapatnya flora dan fauna sebagai salah satu pendorong pengembangan obyek wisata Kota Batu memberikan daya tarik tersendiri sehingga pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Adapun daya tariknya adalah terdapatnya satwa dan tumbuhan langka dikawasan obyek wisata. Karena obyek wisata ini merupakan obyek wisata perpaduan antara obyek wisata alam dengan obyek wisata buatan yang mengandalkan keindahan alam seperti coban rondo, coban talun dan cangar.

Pada saat sekarang ini masyarakat yang terlibat hanya sebatas untuk memperoleh pendapatan diantaranya adalah sebagai pedagang makanan/minuman, dan beberapa sebagai tenaga pengelola obyek wisata. Selama ini pelatihan keterampilan kepada masyarakat sekitar obyek wisata belum pernah ada. Padahal sebenarnya apabila masyarakat di sekitar obyek wisata dapat diberdayakan akan memberikan nilai tambah untuk obyek wisata Kota Batu. Misalnya kerajinan masyarakat dapat dijual untuk cinderamata. Karena sentra cinderamata yang dijual berasal dari masyarakat sekitar.

Pihak pengelola selain harus memperhatikan faktor pendorong juga harus memperhatikan faktor penghambat pengembangan obyek wisata yaitu dalam pelaksanaan pendayagunaan lahan pengembangan harus memperhatikan kondisi alam sekitar mencegah terjadinya kerusakan alam di kawasan obyek wisata karena struktur tanah disekitar kawasan obyek wisata cenderung mudah terjadi longsor.

Faktor anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan kawasan obyek wisata tidak hanya berasal dari APBD Kota Batu saja, sehingga dana yang tersedia menambah peningkatan anggaran dan pembangunan kawasan

obyek wisata menjadi lebih optimal. Karena pada dasarnya untuk membangun kawasan wisata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membangun kawasan wisata merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya tidak dapat langsung dinikmati sekarang, tetapi dapat dirasakan dimasa yang akan datang. Karena itu anggaran yang cukup memadai akan membuat kawasan tersebut lebih menarik karena fasilitas-fasilitas yang ada akan lebih bagus dan menarik sehingga wisatawan tertarik untuk dapat berkunjung. Untuk pengawasan obyek wisata Kota Batu mendapat pengawasan langsung dari Dinas Pariwisata dan pada saat ini hubungan kerjasama antara pihak pengelola dan Dinas Pariwisata sudah cukup baik.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata sudah cukup baik walaupun perlu ditingkatkan. Seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola obyek wisata agar lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dalam segi promosi juga harus lebih ditingkatkan.

Segi prasarana umum yang meliputi air bersih, kelistrikan, jalur-jalur lalu lintas sudah tersedia. Segi kebutuhan pokok pola hidup modern seperti rumah sakit, apotik, bank dan pusat-pusat perbelanjaan sudah tersedia kurang lebih berjarak 1 km dari obyek wisata. Segi prasarana wisata yang meliputi hotel, motel, rumah sewa sudah tersedia di kawasan obyek wisata.

Segi sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang untuk sampai ke lokasi dari pemberhentian kendaraan umum menggunakan angkutan umum atau tersedia juga ojek dan andong. Kondisi jalan menuju lokasi sudah

cukup baik, karena sudah beraspal dan letak obyek wisata sudah cukup strategis karena dekat dengan pusat kota.

Segi pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu cara pandang wisata yang sangat penting seperti cara hidup, sikap, makanan dan pandangan hidup, kebiasaan, tradisi, adat-istiadat di kawasan obyek wisata cenderung berpola hidup modern. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak tempat tinggal mereka tidak berada jauh dari pusat kota. Segi pola hidup masyarakat terjadi karena dilakukan terus-menerus oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan dan membentuk suatu pola.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian tentang Upaya Pemerintah Kota Batu Untuk Mengembangkan Obyek Wisata Dalam Rangka Meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi obyek wisata Kota Batu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Batu adalah dengan cara pelaksanaan pembangunan, meningkatkan sumber daya manusia pengelola kepariwisataan dengan melaksanakan pembinaan, penataran dan pelatihan bagi pengelola pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan obyek wisata, Sosialisasi pada Badan atau Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kota Batu agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor kepariwisataan dan Sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha pariwisata untuk lebih memahami segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya. Dari hasil penelitian di Dinas Pendapatan dapat dilihat bahwa pengembangan obyek wisata Kota Batu berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kota Batu. Kota Batu, walaupun tidak terlalu besar, namun kontribusi obyek wisata Kota Batu terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 30% pertahunnya

2. Faktor yang mendorong dan menghambat serta solusinya dalam pengembangan obyek wisata kota batu yaitu adanya daya Tarik, sarana Perhubungan, Pengelolaan fasilitas, perawatan serta pelayanannya dan Akomodasi. Tentang faktor-faktor yang menghambat pengembangan obyek wisata Kota Batu yaitu terkait dengan adanya faktor eksternal yaitu adanya persaingan yang semakin ketat dengan daerah lain di luar Kota batu sehingga untuk menghindari faktor eksternal tersebut pemerintah Kota batu melakukan pen jagaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kota Wisata Batu, agar Kota Wisata Batu tetap menjadi tempat wisata yang tetap banyak dikunjungi oleh wisatawan.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud): dalam pengembangan potensi obyek wisata Kota Batu hendaknya memperhatikan faktor fisik supaya tidak merusak keseimbangan alam serta dalam pengembangan potensi obyek wisata seoptimal mungkin sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Wisata batu.
2. Bagi pengelola dalam mengelola obyek wisata hendaknya lebih ditingkatkan keprofesionalnya, misalnya dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan kualitas potensi daya tarik wisata.
3. Bagi wisatawan, apabila mengunjungi obyek wisata hendaknya mematuhi peraturan atau himbauan yang ada di Kota Wisata Batu.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

Joyosuharto, Sunardi, "Aspek Ketersediaan dan Tuntutan Kebutuhan Dalam Pariwisata", Liberty, Yogyakarta, 2001.

Pendit, Nyoman, " Ilmu Pariwisata sebuah Perdana", Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Situmorang, " Hukum Adminitrasi Pemerintahan di Daerah", Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Tjahya Supriatna, "Pajak Daerah", PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Grafindo Persada, Jakarta, 2001

W. Riawan Tjandra, "Hukum Keuangan Negara", Grasindo, Jakarta, 2006.

LITERATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU. No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan

UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 66 Tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah

PP. No 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

UU No. 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas UU. No. 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.